

**PEMANFAATAN KARTU INDONESIA PINTAR OLEH KELUARGA
MISKIN DI KELURAHAN LABUHAN RATU RAYA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2016-2017**

(Skripsi)

Oleh

DWI DAMAYANTI



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PEMANFAATAN KARTU INDONESIA PINTAR OLEH KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN LABUHAN RATU RAYA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016/2017

Oleh

Dwi Damayanti

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar oleh keluarga miskin di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung Tahun 2016/2017, dengan titik kajiannya pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar untuk kebutuhan dan keperluan sekolah, penggunaan efektifitas Kartu Indonesia Pintar, dan penggunaan efisiensi Kartu Indonesia Pintar.

Metode yang digunakan adalah deskriptif, populasi pada penelitian ini sebanyak 112 kepala keluarga dan sampel sebanyak 30% atau 34 kepala keluarga penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan tabel frekuensi dan persentase.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Bantuan Kartu Indonesia Pintar dimanfaatkan kepala keluarga untuk kebutuhan dan keperluan sekolah anak yaitu untuk membeli buku sekolah dan membeli alat tulis sekolah sebanyak 100%, sedangkan kepala keluarga yang tidak memanfaatkan bantuan KIP yaitu untuk iuran bulanan dan les (bimbingan belajar) sebanyak 100% karena sudah ditanggung oleh dana BOS. (2) Kepala keluarga yang menggunakan bantuan Kartu Indonesia Pintar secara efektif karena sangat mencukupi untuk kebutuhan dan keperluan sekolah persemester sebanyak 5,9%, sedangkan 64,7% kepala keluarga kurang efektif karena kurang mencukupi untuk kebutuhan dan keperluan sekolah persemester dan 29,4% tidak efektif karena tidak mencukupi untuk kebutuhan dan keperluan sekolah persemester. (3) Bantuan Kartu Indonesia Pintar sudah efisien yaitu tidak untuk membeli yang tidak digunakan seperti ikat pinggang sebanyak 20,6% kepala keluarga dan kotak pensil sebanyak 50% kepala keluarga, sedangkan penggunaan yang kurang efisien dalam pemakaiannya kurang dari persemester yaitu kaos kaki sebanyak 38,2% kepala keluarga.

Kata Kunci: efektifitas, efisiensi, pemanfaatan kartu pintar

**PEMANFAATAN KARTU INDONESIA PINTAR OLEH KELUARGA
MISKIN DI KELURAHAN LABUHAN RATU RAYA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2016-2017**

Oleh

DWI DAMAYANTI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi Pendidikan Geografi



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PEMANFAATAN KARTU INDONESIA PINTAR
OLEH KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN
LABUHAN RATU RAYA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2016-2017.**

Nama Mahasiswa : **Dwi Damayanti**

No. Pokok Mahasiswa : **1313034029**

Program Studi : **Pendidikan Geografi**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

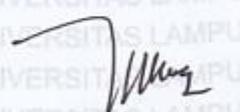
Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

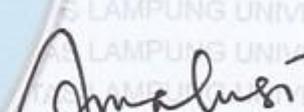


1. Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu

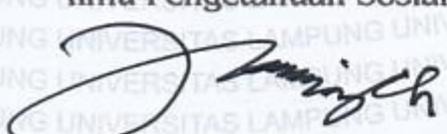

Dra. Hj. Nani Suwarni, M.Si
NIP. 19570912 198503 2 002

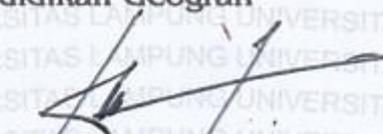

Irma Lusi Nugraheni, S.Pd., M.Si.
NIP. 19800727 200604 2 001

2. Mengetahui

**Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial**

**Ketua Program Studi
Pendidikan Geografi**

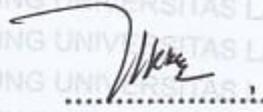

Drs. Zulkarnaian, M.Si.
NIP. 19600111 198703 1 001


Drs. I Gede Sugiyanta, M.Si
NIP. 19570725 198503 1 001

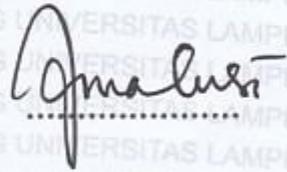
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dra. Hj. Nani Suwami, M.Si



Sekretaris : Irma Lusi Nugraheni, S.Pd., M.Si.



**Penguji
Bukan pembimbing : Dr. Sumadi, M.S.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. H. Muhammad Fuad, S.Hum.
NIP. 195907221986031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Februari 2018

PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Damayanti

NPM : 1313034029

Program Studi : Pendidikan Geografi

Jurusan : Pendidikan IPS

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar dalam kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu oleh naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 14 Februari 2018

Yang Menyatakan



Dwi Damayanti
NPM 1313034029

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 18 Desember 1994, yang merupakan anak kedua dari lima bersaudara, buah hati dari pasangan bapak Yulianto dan Ibu Saodah.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu TK Trisula I Bandar Lampung pada tahun 2001, kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri 1 Rawa Laut pada tahun 2012, dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Utama 3 Bandar Lampung pada tahun 2010, dan kemudian di lanjutkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandar Lampung yang diselaikan pada tahun 2013.

Pada tahun 2013, penulis diterima di Universitas Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Geografi melalui jalur SNMPTN (Regular). Penulis pernah aktif dalam kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Unila (BEMU) sebagai sekretaris kabinet tahun 2014-2015. Kemudian pada bulan Juli 2016, penulis mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKN) di Desa Kutowinangun, Lampung Tengah dan Praktik Pengalaman Kependidikan (PPK) di SMP N 01 Sendang Agung, Lampung Tengah.

MOTTO

Bekerjalah kamu, maka ALLAH akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rosul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (ALLAH) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan

(QS. At Taubah [9]:105)

Abaikanlah orang yang menghina dan merendahkanmu bahkan memfitnah apa yang tidak kamu lakukan, mereka hanya mampu melihat dan mendengar yang belum tentu kebenarannya, sedangkan ALLAH maha mengetahui segalanya.

(Dwi Damayanti)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT,

Kupersembahkan karyaku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta, ayahanda Yulianto dan Ibunda Saodah yang telah membesarkan dengan kasih sayangnya, memberikan semangat, membimbing, memotivasi serta selalu mendoakanku untuk kesuksesanku dalam menyusun karyaku ini.

Almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Bismillahirrohmannirrohim,

Segala Puji bagi ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi yang berjudul Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar oleh Keluarga Miskin di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung Tahun 2016-2017. Ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dra. Nani Suwarni, M.Si. selaku Dosen Pembimbing 1 dan selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing dalam penulisan skripsi ini. Ibu Irma Lusi Nugraheni, S.Pd., M.Si. selaku pembimbing 2, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan nasehat-nasehatnya. Terimakasih kepada Bapak Dr. Sumadi, M.S., selaku dosen pembahas yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Hi. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Lampung terimakasih atas izin dan pelayanan administrasi yang telah diberikan.

3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung terimakasih atas izin dan pelayanan administrasi yang telah diberikan.
4. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Drs. I Gede Sugiyanta., M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga bagi masa depan penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Geografi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh perangkat kelurahan, ketua RT lingkungan I dan lingkungan II serta para kepala keluarga penerima bantuan dan Kartu Indonesia Pintar di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung yang telah memberikan bantuan serta kerjasamanya atas tersusunnya skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu tercinta, kakakku dan adik-adikku mbak Lisa Ratna Pratiwi, Rizky Putra, Fandi Al-Hadi, dan Rizal Al-Majid yang tak henti menyayangiku, memberikan doa dan dukungan serta menantikan keberhasilanku.

9. Sahabatku seperjuangan di geografi 2013 Dina Yunita, Yuni Malinda, Nur andriyani Pratiwi, Anita Khoiri Rohmah, Rina Dewi dan teman-teman geografi angkatan 2013 atas kebersamaannya.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih.

Semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala oleh Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandar Lampung,
Penulis,

2018

Dwi Damayanti

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Masalah.....	6
1.5. Kegunaan Penelitian.....	7
1.6. Ruang Lingkup Kajian Penelitian	7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.1.1 Pengertian Geografi	10
2.1.2 Keluarga Miskin.....	11
2.1.3 Kartu Indonesia Pintar (KIP)	14
2.1.4 Pemanfaatan Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP).....	20
2.1.5 Penggunaan Efektif Kartu Indonesia Pintar (KIP).....	21
2.1.6 Penggunaan Efisien Kartu Indonesia Pintar (KIP).....	23
2.2. Kerangka Pikir	24

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	25
3.2 Populasi dan Sampel	25
3.2.1 Populasi	25
3.2.2 Sampel	26
3.3 Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional Variabel.....	28
3.3.1 Variabel Penelitian	28
3.3.2 Definisi Operasional Penelitian.....	28
3.3.2.1 Pemanfaatan Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP)....	29
3.3.2.2 Penggunaan Efektif Kartu Indonesia Pintar (KIP).....	29

3.3.2.3 Penggunaan Efisien Kartu Indonesia Pintar (KIP).....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.4.1 Observasi.....	31
3.4.2 Wawancara Terstruktur.....	31
3.4.3 Dokumentasi	32
3.5 Analisis Data	32

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Geografi Daerah Penelitian.....	34
4.2 Fisiografi Daerah Penelitian	34
4.2.1 Letak Astronomi dan Letak Administrasi	34
4.2.1.1 Letak Astronomis	34
4.2.1.2 Letak Administratif	36
4.3 Keadaan Iklim.....	40
4.4 Luas dan Penggunaan Lahan	42
4.5 Keadaan Penduduk	44
4.5.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....	44
4.5.2 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.....	45
4.5.3 Jumlah dan Persebaran Penduduk	48
4.6 Komposisi Penduduk.....	49
4.6.1 Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	49
4.6.2 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	53
4.6.3 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian	54
4.7 Identitas.....	56
4.7.1 Umur Responden	56
4.7.2 Tingkat Pendidikan Responden	57
4.7.3 Jenis Pekerjaan Responden.....	59
4.7.4 Tingkat Pendapatan Responden.....	61
4.8 Deskripsi Data Hasil Penelitian	63
4.8.1 Pemanfaatan Bantuan Kartu Indonesia Pintar oleh Keluarga Miskin.....	63

4.8.1.1 Buku Sekolah.....	63
4.8.1.2 Alat Tulis	64
4.8.1.3 Seragam dan Perlengkapsn Sekolah	64
4.8.1.4 Biaya Transportasi	65
4.8.1.5 Iuran Bulanan.....	66
4.8.1.6 Les (Bimbingan Belajar)	66
4.8.2 Penggunaan Efektif Bantuan Kartu Indonesia Pintar oleh Keluarga Miskin.....	68
4.8.3 Penggunaan Efisien Bantuan Kartu Indonesia Pintar oleh Keluarga Miskin	69
4.9 Pembahasan Hasil Penelitian.....	71
4.9.1 Pemanfaatan Bantuan KIP oleh Keluarga Miskin	71
4.9.1.1 Buku Sekolah.....	71
4.9.1.2 Alat Tulis	73
4.9.1.3 Seragam dan Perlengkapan Sekolah.....	74
4.9.1.4 Biaya Transportasi	75
4.9.1.5 Iuran Bulanan	77
4.9.1.6 Les (Bimbingan Belajar)	79
4.9.2 Penggunaan Efektif Bantuan Kartu Indonesia Pintar oleh Keluarga Miskin.....	80
4.9.3 Penggunaan Efisien Bantuan Kartu Indonesia Pintar oleh Keluarga Miskin	82

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	84
5.1.1 Pemanfaatan Bantuan Kartu Indonesia Pintar	84
5.1.2 Efektifitas Penggunaan Bantuan Kartu Indonesia Pintar.....	84
5.1.3 Efisiensi Penggunaan Bantuan Kartu Indonesia Pintar	85
5.2 Saran	85

DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Bantuan Kartu Indonesia Pintar yang diberikan	17
2. Populasi Penerima Bantuan KIP di Kelurahan Labuhan Ratu Raya.....	26
3. Sampel Penerima Bantuan KIP Kelurahan Ratu Raya.....	28
4. Letak Administratif Geografi Ketempat di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Tahun 2016.....	36
5. Luas dan Penggunaan Lahan di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Tahun 2016.....	42
6. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung Tahun 2014-2016.....	45
7. Persebaran Penduduk di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung Tahun 2016.....	48
8. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Tahun 2016.....	50
9. Jumlah Penduduk di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2016.....	54
10. Jumlah Penduduk di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung Menurut Mata Pencarian dan Jenis Kelamin Tahun 2016.....	55
11. Jumlah Responden Menurut Kelompok Umur di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung Tahun 2017.....	56
12. Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung Tahun 2017.....	58
13. Jenis Pekerjaan Responden di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung Tahun 2017.....	60
14. Tingkat Pendapatan Responden Penerima Bantuan Kartu Indonesia Pintar di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung Tahun 2017.....	62
15. Pemanfaatan Bantuan Kartu Indonesia Pintar untuk Kebutuhan Sekolah (Seragam dan Perlengkapan Sekolah).....	65

16. Pemanfaatan Bantuan Kartu Indonesia Pintar untuk Kebutuhan Sekolah (Biaya Transportasi).....	66
17. Pemanfaatan Bantuan Kartu Indonesia Pintar untuk Kebutuhan Sekolah Les (Bimbingan Belajar).....	67
18. Penggunaan Efektif Bantuan Kartu Indonesia Pintar oleh Keluarga Miskin di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung Tahun 2017.....	68
19. Penggunaan Efisien Bantuan Kartu Indonesia Pintar oleh Keluarga Miskin di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung tahun 2017.....	70

Daftar Gambar

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir.....	24
2. Peta Administrasi Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung Tahun 2017.....	39
3. Piramida Penduduk Kelurahan Labuhan Ratu raya Bandar Lampug Tahun 2016.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan yang dihadapi negara Indonesia memang sangat kompleks salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan serangkaian usaha untuk mencapai kemajuan bangsa. Kemajuan bangsa akan dapat terwujud secara nyata dengan usaha menciptakan ketahanan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa. Pendidikan adalah hak manusia untuk dapat menikmati kebebasan mereka sepenuhnya pada waktunya dan demikian juga hal ini merupakan hasil dari kebutuhan vital manusia untuk memperoleh pendidikan agar mereka dapat menggunakan kemampuan-kemampuan mereka (Gaston Mialaret, 1993:25).

Angka kemiskinan di Provinsi Lampung dari penghitungan hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016 mengalami kenaikan mencapai 14,29 persen dibandingkan kondisi sebelumnya September 2015 angka kemiskinan Provinsi Lampung masih 13,53 persen. Dengan kata lain selama periode September 2015 sampai Maret 2016 telah terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sekitar 0,7 persen. Provinsi Lampung masuk dalam daftar angka termiskin nomor 10 di Indonesia. Angka kemiskinan di Provinsi Lampung Maret 2016 masih lebih tinggi dibanding dengan angka nasional yang sebesar 10,86 persen,” (Kepala Bidang Statistik Sosial Mukhamad Mukhanif: BPS Provinsi Lampung). Angka kemiskinan meningkat, tingkat kemiskinan selama periode September 2015-Maret

2016. Lebih signifikan terjadi di daerah urban (perkotaan) yang naik 13,77 persen sedangkan di daerah rural (perdesaan) naik 4,28 persen. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin jika tidak terjadi peningkatan pendapatan.

Kebijakan penanggulangan pada kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh. Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak- anak yang terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Sejalan dengan hal tersebut, maka penanggulangan kemiskinan terhadap kaum fakir miskin yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam pasal 7 ayat (1) didasari atas pemenuhan hak-hak dasar yang dilaksanakan dalam bentuk pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum, dan pelayanan sosial. Hal tersebut di implementasikan pemerintah dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan seperti Program Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan menuntut kualitas pendidikan, pada Pasal 43 ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar serta satuan pendidikan yang sederajat. Salah satu indikator dalam penuntasan program wajib belajar dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). Sekolah gratis adalah upaya pemerintah yang membebaskan biaya operasional sekolah pada siswa miskin, namun bukan biaya individu siswa seperti kebutuhan pribadinya (seragam, alat tulis, transportasi, uang saku dll).

Pemerintah mengeluarkan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk membantu memenuhi keperluan prasarana dan sarana dalam pembelajaran disekolah kepada seluruh siswa baik itu siswa yang mampu maupun yang miskin. Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan yang penting dalam sebuah sekolah, apabila sarana dan prasarana tidak terpenuhi, maka kegiatan pembelajaran tidak akan optimal. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang dan sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti: ruang, buku, perpustakaan, labolatorium dan sebagainya.

Biaya Operasional Sekolah (BOS) inilah yang menggantikan SPP sehingga siswa tidak dibebankan biaya bulanan. Selain dana BOS yang disalurkan pemerintah, siswa yang bersangkutan juga menerima BSM (Bantuan Siswa miskin) yang bisa digunakan untuk keperluan kebutuhan pribadinya (seragam, tas, alat tulis, dll). Selain adanya bantuan yang berasal dari program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BSM (Bantuan Siswa miskin) pemerintah juga mengeluarkan Program Indonesia Pintar (PIP) yang berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai bagian dari penyempurnaan BSM yang merupakan sebuah program yang bertujuan membantu keluarga miskin untuk membiayai anaknya bersekolah yang berdasarkan pada Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 1. Dengan besaran bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang mencapai 20,3 juta anak/ siswa usia sekolah/ lembaga pendidikan dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang sasarannya berjumlah 17.927.308 jiwa dan besar anggarannya berjumlah Rp.10.424.340.157.000, diharapkan akan dapat mengatasi rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) sekaligus sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang lebih baik.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah. Hingga saat ini, partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, perlengkapan seragam, dan alat tulis, sementara biaya

yang tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku, dan biaya lain-lain.

Dengan adanya bantuan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan mampu membantu keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan sekolah lainnya seperti buku tulis, alat tulis, seragam dan perlengkapan sekolah, biaya transportasi, iuran bulanan dan les (bimbingan belajar) dimana bantuan ini akan diberikan kepada setiap anak dengan jumlah dana per semesternya pada jenjang SD diberikan sebesar Rp. 225.000, jenjang SMP diberikan sebesar Rp. 375.000 dan pada jenjang SMA sebesar Rp. 500.000. Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan diberikan kepada kepala keluarga yang menerima bantuan sosial dari pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Labuhan Ratu Raya berjumlah 112 kepala keluarga yang anaknya bersekolah pada jenjang Sekolah Dasar, dimana pada lingkungan I berjumlah 69 kepala keluarga dan lingkungan II berjumlah 43 kepala keluarga. Jumlah anak yang menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Labuhan Ratu Raya pada jenjang SD berjumlah 174 anak, jenjang SLTP berjumlah 102 anak, dan jenjang SLTA 115 anak. Berdasarkan uraian diatas, masalah yang akan diteliti ialah "Pemanfaatan Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh Keluarga Miskin di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung Tahun 2016/2017".

1.2 Identifikasi Masalah

1. Belum diketahui pemanfaatan bantuan Kartu Indonesia Pintar.
2. Belum diketahui penggunaan efektif bantuan Kartu Indonesia Pintar.
3. Belum diketahui penggunaan efisien bantuan Kartu Indonesia Pintar.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemanfaatan bantuan Kartu Indonesia Pintar oleh keluarga miskin di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung?
2. Apakah bantuan Kartu Indonesia Pintar oleh keluarga miskin di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung sudah dilakukan secara efektif?
3. Apakah bantuan Kartu Indonesia Pintar oleh keluarga miskin di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung sudah dilakukan secara efisien?

1.4 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemanfaatan bantuan Kartu Indonesia Pintar oleh keluarga miskin di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung?
2. Untuk mengetahui penggunaan bantuan Kartu Indonesia Pintar oleh keluarga miskin di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung sudah dilakukan secara efektif?
3. Untuk mengetahui penggunaan bantuan Kartu Indonesia Pintar oleh keluarga miskin di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung sudah dilakukan secara efisien?

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Sebagai masukan bagi instansi tentang peranan Kartu Indonesia Pintar (KIP) khususnya bagi anak keluarga miskin di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung.
3. Sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman bagi penulis dalam melakukan penganalisaan tentang Kartu Indonesia Pintar (KIP).

1.6 Ruang Lingkup Kajian Penelitian

Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Ruang lingkup subjek penelitian adalah kepala keluarga miskin yang anaknya menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar pada jenjang SD.
2. Ruang lingkup obyek penelitian ini adalah Pemanfaatan KIP .
3. Ruang lingkup lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung.
4. Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah tahun 2016-2017.
5. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah geografi sosial.

Geografi sosial adalah ilmu yang menjelaskan mengenai interaksi antara manusia dengan lingkungan sosialnya yaitu manusia dengan manusia lainnya. Geografi sosial dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dibidang sosial, politik ekonomi, dan budaya. Maksudnya

adalah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder pasti akan memanfaatkan lingkungan sekitarnya.

Menurut (Bintarto dalam Budiyono, 2003:30) geografi sosial meliputi: a) manusia, baik sebagai individu dan kelompok, b.) lingkungan alam (sebagai tempat tinggal dan aktivitas), c.) hubungan dan pengaruh timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam, dan manusia dengan manusia.

Kontribusi geografi sosial dalam kehidupan manusia adalah manusia dapat beradaptasi pada lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dapat berinteraksi dan menyesuaikan dirinya pada lingkungan alam dan sosial disekitarnya. Dengan adanya geografi sosial yang didalam keruangannya mengkaji ilmu alam, manusia juga menyesuaikan mata pencarian sesuai dengan alam sekitarnya.

Kajian ini menempatkan manusia sebagai pokok kajian (meliputi aspek kependudukan, ekonomi, politik, dan sosial budaya), dalam hubungannya dan pengaruhnya antara manusia dengan manusia yaitu pemanfaatan bantuan Kartu Indonesia Pintar yang diberikan pemerintah oleh keluarga miskin, sehingga anak yang orangtuanya miskin dapat bersekolah dan terpenuhinya keperluan sekolahnya karena adanya bantuan sosial dari pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Secara geografis, ruang adalah keseluruhan permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer tempat hidup bagi makhluk hidup. Dalam geografi sosial, ruang memiliki makna yaitu hubungannya dan pengaruhnya antara manusia dengan alam, kepala keluarga yang memanfaatkan alam sebagai sarana untuk mencari nafkah, memanfaatkan daerah yang dekat dengan pasar bekerja sebagai buruh ojek dan buruh becak, serta kepala keluarga yang memanfaatkan lahan pertanian untuk bercocok tanam padi, singkong dan kelapa. Dengan demikian terjadilah hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Geografi

Menurut (Bintarto dalam Samadi, 2013:4), geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitra, merangkan sifat bumi, menganalisis keadaan alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi ruang dan waktu.

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer (muka bumi) dengan sudut pandang kelingkungan (ekologis) dan kewilayahan (regional) dalam konteks keruangan (*space*), (Seminar dan lokakarya Geografi tahun 1989 yang disepakati oleh Ikatan Geografi Indonesia (IGI) dalam Nursid Sumaatmadja, 1997:11).

Berdasarkan pendapat diatas penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan (*space*), karena pendekatan keruangan (*space*) adalah upaya dalam mengkaji rangkaian dan fenomena geosfer dalam ruang, pada pendekatan keruangan yang menjadi fokus pengamatan adalah persebaran kegunaan ruang dan manfaat yang akan didapatkan dari ruang yang disediakan. Dengan pendekatan keruangan yang dilihat dari aspek geosfer yaitu klimatologi (iklim dan cuacanya). Kelurahan Labuhan Ratu Raya memiliki ruang persawahan dan perkebunan yang cukup luas, sehingga kepala keluarga memanfaatkannya untuk mencari nafkah dengan cara

bercocok tanam padi, singkong, dan kelapa. Selain itu, Kepala keluarga miskin yang tinggal di daerah perkotaan memanfaatkan lingkungan untuk mencari nafkah sebagai tukang ojek, tukang becak, dan buruh bangunan dengan pekerjaan tersebut kepala keluarga membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk meringani membeli keperluan dan pelengkapan sekolah anak mereka.

2.1.2 Keluarga Miskin

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam prekonomian baik secara individu maupun keluarga, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Telah banyak program dari pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan, bantuan dari pemerintah yaitu berupa uang tunai, bantuan tersebut bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang berbentuk Kartu Indonesia Pintar. Kemiskinan menurut Harmonangan Ritonga (2003:1) adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum yang layak bagi kehidupannya. Sedangkan kemiskinan menurut Selo Soemardjan (2003:29) mengatakan bahwa:

“Faktor-faktor penentu atau determinan kemiskinan sangat tergantung pada kemampuan keluarga untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan sosialnya, yang dapat dilihat dari penduduk atau keluarga tersebut, kemiskinan dapat terjadi bilamana seseorang dalam rumah tangga tidak memiliki kemampuan atau tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan pokoknya”.

Dalam penetapan keluarga miskin yang berhak menerima bantuan dari pemerintah menggunakan acuan dari BPS tahun 2014 tentang 16 Kriteria Kemiskinan, yaitu :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0, 5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
15. Mempekerjakan anak di bawah umur.
16. Tidak mampu membiayai anak untuk sekolah.

Kriteria rumah tangga miskin yang ditetapkan BPS tahun 2014 didasarkan pada besarnya rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan dan nonpangan per kapita per bulan. Kriteria statistik BPS tersebut yaitu :

1. Tidak miskin, mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610.
2. Hampir Tidak Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488.s/d. – Rp 350.610.- atau sekitar antara Rp 9.350 s/d. Rp11.687.- per orang per hari.
3. Hampir Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740.- s/d Rp 280.488.- atau sekitar antara Rp 7.780.- s/d Rp 9.350.- per orang per hari.
4. Miskin, dengan pengeluaran per orang perbulan per kepala Rp 233.740.- kebawah atau sekitar Rp 7.780.- kebawah per orang per hari.
5. Sangat Miskin (kronis), tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari.

Berikut merupakan syarat dan ketentuan penerima Bantuan Kartu indonesia Pintar, yaitu:

1. Siswa yang diutamakan memiliki kartu BSM (Bantuan Siswa Miskin) atau orang tua yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
2. Keluarga/orangtua yang diutamakan mempunyai atau terdaftar sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) sebagai pengganti Kartu Pelindungan Sosial (KPS) dan Kartu Program Harapan (PKH).
3. Siswa yatim atau piatu.

Berdasarkan uraian tersebut keluarga miskin yang mendapatkan bantuan Kartu indonesia Pintar memiliki pendapatan yang tidak menentu dan mempunyai rumah yang kecil yang mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk memenuhi keperluan sekolah anaknya karena penghasilannya yang tidak menentu. Syarat anak yang menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar adalah kepala keluarga yang memiliki kartu BSM (Bantuan Siswa Miskin) atau orang tua yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

2.1.3 Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan komitmen pemerintah dalam hal mewujudkan pendidikan tanpa diskriminasi dan pendidikan untuk meningkatkan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu. Pemerintah membuat Program Indonesia Pintar sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Sehat, dan Program Indonesia Pintar yang berupa Kartu Indonesia Pintar, untuk membangun Keluarga Produktif. Hal ini sejalan dengan 9 agenda pemerintah presiden Jokowi yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Hal ini selaras dengan yang dikatakan Yoyon Bahtiar Irianto (2011:8), bahwa:

“Investasi dalam bidang pendidikan secara dini akan menjaminterwujudnya pemenuhan hak asasi manusia, meningkatkan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terwujudnya masyarakatsejahtera, mempunyai kemampuan mengelola teknologi, mempunyaikeunggulan kompetitif yang tinggi dan menjamin kelangsungan hidupmasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1, “ Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantua Siswa Misikin (BSM) ”.

Berdasarkan Permendikbud No 19 Tahun 2016 pasal 3 ayat Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip:

- a. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Landasan hukum pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomer 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomer 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
5. Peraturan Presiden Nomer 14 Tahun 2015 Tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Instruksi Presiden Nomer 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 254/MPK.05/2015 tentang belanja Bantuan Sosial pada Kementrian /Lembaga.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 79 Tahun 2015 tentang Dana Pokok Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 19 Tahun 20156 tentang Program Indonesia Pintar.

10. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomer Per-16/PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa Bakat dan Prestasi.

Berdasarkan Permendikbud No 19 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1, penerima KIP adalah anak usia 6 - 21 tahun yang bersekolah maupun tidak bersekolah, yang berasal dari keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selanjutnya anak-anak usia sekolah dari rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan melaporkan KIP tersebut ke sekolah/madrasah untuk diusulkan sebagai penerima manfaat program tersebut. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima program agar menjangkau anak-anak usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan sesuai kuota dan pagu anggaran yang tersedia.

Tujuan dari Program Indonesia Pintar Melalui KIP, yaitu :

1. Menghilangkan hambatan anak (usia sekolah) secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah.
2. Mencegah anak/siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.
3. Mendorong anak/siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah.
4. Membantu anak/siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran.
5. Mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (9) dan Pendidikan Menengah Universal (Wajib Belajar 12 tahun).

Berikut merupakan prioritas penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), yaitu:

1. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah pada 2016.
2. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS yang telah menerima bantuan Program Indonesia Pintar pada 2015 dari Kemdikbud dan Kemenag.
3. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tinggal di Panti Asuhan/Sosial.
5. Siswa/santri (6-21 tahun) dari Pondok Pesantren yang keluarga/rumah tangganya memiliki KKS (khusus untuk PIP Kementerian Agama) maupun melalui jalur usulan Pondok Pesantren (sejenis FUM/Formulir Usulan Madrasah).
6. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi dan/atau korban musibah berkepanjangan/bencana alam.

Tabel 1. Jumlah Bantuan Kartu Indonesia Pintar yang diberikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Bantuan per semester/6 bulan
SD/ MI/ Diniyah Formal Ula/ SDTK Pondok Pesantren (santri hanya mengaji usia 7-12 thn) Kejar Paket A/PPS Wajar Dikdas Ula	Rp. 225.000,-
SMP/MTS/Diniyah Formal Wustha/SMPTK Pondok Pesantren (Santri hanya mengaji usia 13-15 thn) Kejar Paket B/PPS Wajar Dikdas Wustha	Rp.375.000,-
SMA/SMK/MA/Diniyah Formal Ulya/Muadalah/SMTK/SMAK Pondok Pesantren (santri hanya mengaji usia 16-18 thn) Kejar Paket C/PMU Ulya/Lembaga pelatihan/kursus	Rp. 500.000,-

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2016.

Selain bantuan yang berasal dari Kartu Indonesia Pintar anak usia 7-15 tahun yang wajib belajar 9 tahun mendapatkan bantuan yang berasal dari pemerintah yaitu berupa Bantuan Operasional Sekolah. Bantuan pembiayaan oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan memungkinkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan gratis untuk tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP/ sederajat). Tiap-tiap pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang beraneka ragam sesuai kemampuan daerah.

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk menyediakan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan sarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) mempunyai tujuan, yaitu:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah.
2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri maupun swasta.
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Landasan hukum pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
4. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/ 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
8. Peraturan Mendiknas No. 46 Tahun 2007 tentang penetapan buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang buku.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.12 Tahun 2008 tentang penetapan buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas bahwa selain adanya bantuan dari Kartu Indonesia Pintar anak dari keluarga miskin juga mendapatkan bantuan yang berasal dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dimana Kartu Indonesia Pintar dibutuhkan bagi anak miskin untuk membantu membeli keperluan sekolah seperti perlengkapan seragam sekolah, buku sekolah, alat tulis, dan transportasi karena tidak semua biaya ditanggung oleh dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

2.1.4 Pemanfaatan Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Pengertian pemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003: 711) yang menyebutkan bahwa pemanfaatan mengandung arti yaitu proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan sendiri. Dengan demikian pemanfaatan berdasarkan pengertiannya masing-masing adalah guna, proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini adalah pemanfaatan bantuan Kartu Indonesia Pintar oleh keluarga miskin untuk kebutuhan dan keperluan sekolah anak.

Kartu Indonesia Pintar merupakan kartu yang diberikan dari Program Indonesia Pintar yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7-15 tahun. Mereka yang mendapat KIP akan diberikan dana tunai dari pemerintah secara reguler yang tersimpan dalam fungsi Kartu Indonesia Pintar untuk meringankan keperluan sekolah. Jumlah bantuan yang diberikan persemester melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-15 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mendapatkan manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B) atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus yang ditentukan oleh Pemerintah untuk mendapatkan pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pendidikan merupakan bagian dari

tujuan pembangunan nasional yang telah dirumuskan melalui UUD 1945 No.20 tentang Sistem pendidikan Nasional, yaitu :

- a. Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat. (Tilar. H.A.R, 2009:5).

Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah (2016: 28) pemanfaatan dana tunai pendidikan dari bantuan KIP digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendukung biaya pendidikan siswa seperti:

1. Pembelian buku
2. Alat tulis sekolah.
3. Pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll).
4. Biaya transportasi ke sekolah.
5. Iuran bulanan siswa.
6. les (bimbingan belajar).

2.1.5 Penggunaan Efektif Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *Effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Arens and Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Jusuf Amir Abadi (1999:765), mendefinisikan efektifitas sebagai pencapaian suatu tujuan. Sehubungan dengan yang Arens dan Lorlbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Soerjono Soekanto (1989:48) mendefinsian efektifitas yaitu sebagai berikut:

“Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya/biaya untuk mencapai hasil dari suatu kegiatan yang dijalankan. Efektif dalam penggunaan dana pendidikan adalah jika dengan dana tersebut dapat memenuhi segala perencanaan yang sudah dibuat hingga sempurna dengan tepat waktu”.

Dari beberapa uraian definisi efektifitas tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapaun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat dilihat dengan beberapa indikator misalnya: pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan (Soerjono Soekanto, 1989:48).

Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat dikatakan efektif apabila dengan dana yang diberikan persemesternya pada jenjang SD sebesar Rp. 225.000, jenjang SLTP sebesar Rp. 375.000, dan jenjang SLTA sebesar Rp. 500.000 dapat tercukupi untuk kebutuhan dan keperluan anak. Pengawasan terhadap penggunaan bantuan Kartu Indonesia Pintar yang diterima oleh keluarga miskin atau rentan miskin setiap semesternya pada kalender sekolah. Memunculkan kerawanan terhadap penerima dalam hal penggunaan dana untuk keperluan diluar biaya sekolah atau disalahgunakan, misalnya membayar hutang, membeli obat, membeli sayur (lauk pauk) atau keperluan rumah tangga seperti sembako (beras, minyak goreng, gula, dll), bahkan bisa saja dana tersebut digunakan untuk membeli rokok. Penggunaan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dikatakan efektif apabila bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan anak bersekolah.

2.1.6 Penggunaan Efisien Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Efisien adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya atau biaya dalam suatu proses. Semakin sedikit penggunaan sumber daya atau biaya, maka prosesnya semakin efisien. Dengan kata lain efisien merupakan bekerja menggunakan sumber daya atau biaya yang sesuai tanpa pemborosan dengan penggunaan yang minimum guna untuk mencapai hasil yang optimum.

Efisiensi adalah perbandingan yang positif antara hasil yang ingin dicapai dengan masukan yang akan dipergunakan. Dengan demikian efisiensi berarti ketepatan cara (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya) kedayagunaan dan kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (Menurut Sondang Siagian, 1995:148). Menurut Mulyamah, (1987:3) dalam bukunya manajemen perubahan mendefinisikan efisiensi sebagai berikut :

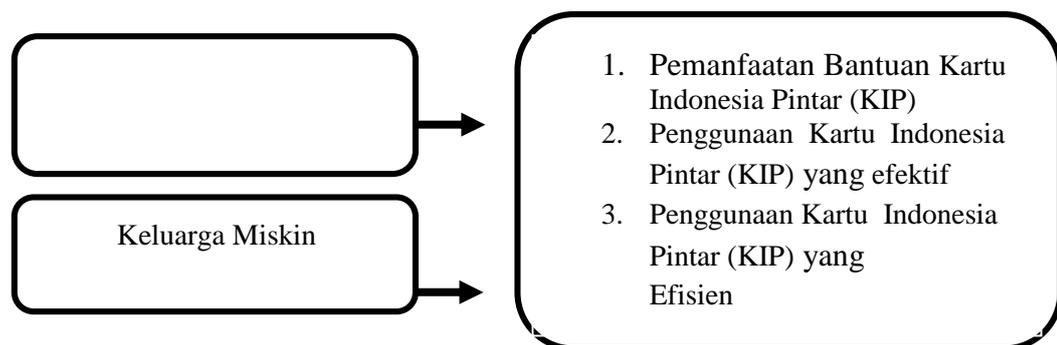
“Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan tanpa melihat tujuan. Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau penggunaan yang sebenarnya“.

Efisiensi dana dalam pendidikan adalah penggunaan dana yang harganya sesuai atau lebih kecil dari perencanaan layanan pendidikan (Soerjono Soekanto, 1989:48). Penggunaan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dikatakan efisien apabila bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan anak keluarga miskin untuk bersekolah tanpa adanya pemborosan dalam membeli kebutuhan dan keperluan sekolah anak dengan baik dan tepat.

2.2 Kerangka Pikir

Masalah kemiskinan yang dihadapi saat ini memang sangat kompleks salah satunya adalah pendidikan, untuk mengatasi masalah pendidikan pemerintah mengeluarkan Program Indonesia Pintar yang berupa bantuan dana dalam Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang akan diberikan dana tunai dari pemerintah secara reguler yang tersimpan dalam Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar Rp 225.000 persemester yang pemanfaatannya untuk membantu meringankan membeli kebutuhan dan keperluan anak bersekolah seperti buku sekolah, alat tulis sekolah, seragam sekolah, biaya transportasi, iuran bulanan, dan les (bimbingan belajar), dengan dana tersebut dalam penggunaannya diperlukan secara efektif dan efisien supaya bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bermanfaat selama 1 semester pada kepala keluarga yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung. Sehingga kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut :

Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut (Sumadi Suryabrata, 2000:18), bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan membuat secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Suharsimi Arikunto, 2006:195) yang mengatakan bahwa metode yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau suatu fenomena.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dengan menggunakan metode penelitian deskriptif diharapkan mampu menggambarkan suatu fenomena yang terdapat dilapangan. Berkaitan dengan penelitian ini maka fenomena yang akan dilihat adalah pemanfaatan bantuan Kartu Indonesia Pintar oleh keluarga miskin di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2010:115). Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga miskin penerima bantuan dari Kartu Indonesia Pintar untuk tingkat Sekolah Dasar yang tersebar

pada 2 Lingkungan di kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Populasi Penerima Bantuan KIP di Kelurahan Labuhan Ratu Raya

No.	Lk Kelurahan Labuhan Ratu Raya	Keluarga Miskin Penerima KIP
1	Lk 1	69
2	Lk 2	43
	Jumlah	112

Sumber : Lurah Kelurahan Labuhan Ratu Raya Tahun 2016

3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari obyek atau individu-individu yang mewakili suatu populasi (Moh. Pabundu Tika, 2005:24). Untuk menentukan besarnya sampel maka penulis berpedoman pada pendapat (Suharsimi Arikunto, 2006:108) yaitu :

“Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjek besar diambil antara 10% sampai 15% atau 20% sampai 25% atau lebih, tergantung kemampuan teliti dari segi waktu, tenaga, dan dana, sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek dan besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti”.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga layak dijadikan sampel (Sugiyono, 2010:88). Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, pertimbangan yang diberikan adalah kepala keluarga yang mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar yang menerima bantuan sosial dari pemerintah yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), maka sampel yang ditentukan adalah kepala keluarga miskin yang menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sehingga mendapatkan bantuan dana sebesar Rp.225,000 persemester dari Kartu Indonesia Pintar.

Pengambilan sampel pada penelitian ini diambil 30% dari populasi di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung, untuk mengetahui jumlah sampel menggunakan perhitungan pengambilan sampel yaitu dengan cara jumlah penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar dibagi dengan 30%. Berikut merupakan caranya:

$$\begin{aligned}
 \text{Lingkungan I} &= 69 \times 30\% \\
 &= 69 \times \frac{30}{100} \\
 &= \frac{2.070}{100} \\
 &= 20,7 \\
 &= 21 \text{ (pembulatan)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Lingkungan I} &= 43 \times 30\% \\
 &= 43 \times \frac{30}{100} \\
 &= \frac{1.290}{100} \\
 &= 12,9 \\
 &= 13 \text{ (pembulatan)}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan pengambilan sampel di atas dapat dilihat bahwa pada Lingkungan I sampel berjumlah 21 kepala keluarga dan pada Lingkungan II sampel berjumlah 13 kepala keluarga, sehingga hasil penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling* tersebut dapat lebih memberikan hasil yang representatif yaitu sampel yang bisa mewakili keadaan populasinya, dari jumlah sampel sebanyak 34 kepala keluarga penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar ada kepala keluarga yang menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar lebih dari satu anak. Bantuan Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada kepala keluarga atau salah satu

dari orangtua dikarenakan anak masih bersekolah pada jenjang Sekolah Dasar, sehingga yang mengurus dan menerima dana persemesternya dari bantuan Kartu Indonesia Pintar adalah kepala keluarga atau salah satu orang tuanya. Berikut merupakan tabel sampel penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar.

Tabel 3. Sampel Penerima Bantuan KIP Kelurahan Labuhan Ratu Raya

No.	Lk Kelurahan Labuhan Ratu Raya	Total Penerima KIP	Sampel KK (30%)	Persentase (%)
1	Lk 1	69	21	61,8
2	Lk 2	43	13	38,2
	Jumlah	112	34	100

Sumber : Lurah Kelurahan Labuhan Ratu Raya Tahun 2017

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:60). Adapun variabel dalam penelitian ini adalah pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar, penggunaan efektif bantuan Kartu Indonesia Pintar dan efisien bantuan Kartu Indonesia Pintar oleh keluarga miskin.

3.3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Masri Singarimbun, 1995:33) dengan cara memberi arti kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

3.3.2.1 Pemanfaatan Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Pemanfaatan adalah guna, proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan sesuatu.

Pemanfaatan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendukung biaya keperluan sekolah anak keluarga miskin, yaitu:

1. Pembelian buku
2. Alat tulis sekolah
3. Pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll)
4. Biaya transportasi kesekolah
5. Iuran bulanan siswa
6. les (bimbingan belajar)

Berikut merupakan katagori untuk pemanfaatan Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), yaitu:

- a. Dimanfaatkan apabila bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) digunakan untuk kebutuhan dan keperluan sekolah anak.
- b. Tidak dimanfaatkan apabila bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) digunakan untuk keperluan selain kebutuhan dan keperluan sekolah anak.

3.3.2.2 Penggunaan Efektif Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya biaya untuk mencapai hasil dari suatu kegiatan yang dijalankan. Efektif dalam penggunaan dana pendidikan adalah jika dengan dana tersebut dapat memenuhi segala perencanaan yang sudah dibuat hingga sempurna dengan tepat waktu. Penggunaan yang efektif dari bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah untuk

memenuhi kebutuhan dan keperluan sekolah anak selama satu semester. Berikut merupakan katagori untuk efektif, yaitu:

- a. Efektif apabila bantuan KIP cukup untuk keperluan sekolah seperti alat tulis, pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll), Biaya transportasi ke sekolah, iuran bulanan siswa, Biaya kursus/les tambahan persemesternya.
- b. Kurang efektif apabila bantuan KIP kurang mencukupi untuk keperluan sekolah seperti alat tulis, pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll), Biaya transportasi ke sekolah, iuran bulanan siswa, Biaya kursus/les tambahan persemesternya.
- c. Tidak efektif apabila bantuan KIP tidak mencukupi digunakan untuk keperluan sekolah seperti alat tulis, pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll), Biaya transportasi ke sekolah, iuran bulanan siswa, Biaya kursus/les tambahan persemesternya.

3.3.2.3 Penggunaan Efisien Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Efisien adalah ukuran tingkat penggunaan biaya dalam suatu proses, efisien berarti menggunakan dana yang sesuai tanpa pemborosan. Efisiensi dana dalam pendidikan adalah penggunaan dana yang harganya sesuai atau lebih kecil dari perencanaan layanan pendidikan. Penggunaan yang efisien dari bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah untuk membeli kebutuhan dan keperluan sekolah yang hanya benar-benar dibutuhkan anak selama bersekolah seperti tas sekolah, sepatu sekolah, kaos kaki, dan seragam sekolah.

Berikut merupakan katagori untuk efisien, yaitu:

- a. Efisien apabila penggunaan dana KIP untuk membeli kebutuhan dan keperluan sekolah yang hanya dibutuhkan anak atau yang sudah rusak dan abis selama persemester.
- b. Kurang efisien apabila penggunaan dana KIP untuk membeli kebutuhan dan keperluan sekolah yang hanya dibutuhkan anak atau yang sudah rusak dan abis kurang dari persemester.
- c. Tidak efisien apabila penggunaan dana KIP untuk membeli yang bukan kebutuhan dan keperluan sekolah anak.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian (Moh. Pabundu Tika, 2005:44). Teknik observasi dilakukan dengan mengamati kondisi rumah, dan sekitarnya pada keluarga miskin penerima KIP di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung.

1.4.2 Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yan telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan yang sama diajukan kepada semua responden, dalam kalimat dan urutan yang seragam (Basuki Sulistio, 2006:110). Berdasarkan pendapat tersebut tujuan digunakan teknik wawancara ini adalah untuk memperoleh data tentang penerimaan bantuan KIP yang dilakukan dengan cara bertanya menggunakan angket untuk menggali data tentang pemanfaatan

Kartu Indonesia Pintar, penggunaan efektif dan efisien bantuan Kartu Indonesia Pintar oleh salah satu orang tua dari penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung.

3.4.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2006:231). Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang bersumber dari kantor Kelurahan seperti profil Kelurahan Labuhan Ratu Raya, jumlah penerima bantuan KIP, serta data-data lainnya yang dianggap perlu untuk mendukung dalam penelitian ini.

1.5 Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010:245) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tabel frekuensi dan persentase berdasarkan kualifikasi data yang telah terkumpul dari hasil penelitian. Tabel dan persentase tersebut digunakan sebagai dasar peneliti untuk mendeskripsikan data yang telah ditabelkan.

Untuk menghitung jumlah persentase dari jawaban responden menurut katagori jawaban digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{f}{N} \times 100$$

Keterangan:

% = Persentase yang diperoleh

f = Variabel

N = Jumlah frekuensi

100 = Konstanta (Arief Sukadi Sadiman, 1996:96).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pemanfaatan Bantuan Kartu Indonesia Pintar

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pemanfaatan bantuan Kartu Indonesia Pintar di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa 100% kepala keluarga memanfaatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar digunakan untuk membeli buku tulis dan alat tulis, sedangkan 100% kepala keluarga tidak memanfaatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar untuk iuran bulanan dan les (bimbingan belajar) karena sudah ditanggung oleh pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

5.1.2 Efektifitas Penggunaan Bantuan Kartu Indonesia Pintar

Penggunaan Bantuan Kartu Indonesia sudah efektif karena sudah digunakan untuk membeli kebutuhan dan keperluan sekolah anak persemesternya sangat cukup untuk membeli yang hanya dibutuhkan saja sebanyak 5,9% kepala keluarga, sedangkan yang kurang efektif digunakan untuk membeli kebutuhan dan keperluan sekolah anak persemesternya kurang mencukupi sebanyak 64,7% kepala keluarga dan yang tidak efektif digunakan untuk membeli kebutuhan dan keperluan sekolah anak persemesternya tidak mencukupi karena dana yang diberikan persemesternya tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan sekolah sebanyak 29,4% kepala keluarga.

5.1.3 Efisiensi Penggunaan Bantuan Kartu Indonesia Pintar

Penggunaan Bantuan Kartu Indonesia Pintar sudah efisien yaitu tidak untuk membeli keperluan sekolah yang tidak digunakan seperti ikat pinggang sebanyak 20,6% kepala keluarga dan kotak pensil sebanyak 50% kepala keluarga. Sedangkan penggunaan yang kurang efisien dalam pemakaiannya kurang dari persemester yaitu kaos kaki sebanyak 38,2% kepala keluarga.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian , maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan kepala keluarga yang menerima bantuan KIP dapat memanfaatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar yang diberikan persemesternya sebesar Rp.225.000 untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan sekolah anak.
- b. Diharapkan kepada kepala keluarga yang menerima pemanfaatan bantuan KIP agar bisa lebih efektif lagi dalam mengatur penggunaan dana untuk membeli kebutuhan dan keperluan sekolah anak persemesternya.
- c. Diharapkan kepada kepala keluarga yang menerima pemanfaatan bantuan KIP agar bisa lebih efisien lagi dalam memakai perlengkapan sekolah dengan hemat serta merawat dan menjaga barang kebutuhan sekolah sehingga pembeliannya tidak kurang dari persemester

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Anonim. 2016. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2016. Dinas Pendidikan.
- . . 2015. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS. Dinas Pendidikan.
- . . 2015. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta
- Arief Sukadi Sadiman. 1996. *Metode dan Analisa Penelitian Mencari Hubungan*. Erlangga. Jakarta.
- Basuki Sulistio. 2006. *Metode Penelitian*. Wedatama Wydia Satra. Jakarta.
- Budiyono. 2003. *"Geografi Sosial". Buku Ajar Pendidikan Geografi. FKIP Universitas Lampung*. Bandar Lampung.
- Bintarto. 1986. *Metode Analisa Geografi*. LP3ES. Jakarta.
- Depdikbud. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Daljoeni. 1977. *Masalah Penduduk dalam Fakta dan Angka*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Dalyono. 2001. *Psikologi Pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Gaston Mialaret. 1993. *Hak Anak-Anak Untuk Memperoleh Pendidikan*. Balai Pustaka. Jakarta.

- Harmonangan Ritonga. 2003. *Perhitungan Penduduk Miskin. Badan Pusat Statistik (BPS)*, Jakarta.
- Henry Guntur Tarigan. 2009. *Pengajaran Wacana*. Angkasa. Jakarta.
- Ida Bagus Mantra. 2003. *Demografi Umum Edisi Kedua*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Jusuf Amir Abadi. 1999. *Pendekatan Terpadu*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kartono. 1995. *Psikolog anak (psikologi perkembangan)*. Mandar Maju. Bandung.
- Loekman Soetrisno. 1997. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Masri Singarimbun. 1995. *Metode Penelitian Survey*. PT. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- M. Subarjo. 2006. *Meteorologi Dan Klimatologi*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Moh. Pabundu Tika. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mulyamah. 1987. *Manajemen Perubahan*. Yudhistira. Jakarta.
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Ar-Ruzz Media Group. Jakarta.
- Nanang Fattah. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nursid Sumaatmadja. 1997. *Metodologi Pengajaran Geografi*. Bumi Aksara. Bandung.
- Prayitno. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Saidiharjo. 1982. *Penduduk Kehidupan Sosial Ekonomi dan Lingkungan*. Tiga Serangkai. Solo.

- Samadi. 2013. *Geografi 1 Ilmu-Ilmu Sosial*. Quadra. Bandung.
- Selo Soemartjan, 2003. *Menyusun Liku-liku Pendataan Keluarga BKKBN*: Jakarta.
- Simanjuntak Payman. 2001. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Falkutas Ekonomi, Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sondang Siagian. 1995. *Organisasasi, Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*. PT. Gunung Agung. Jakarta.
- Sudarmi. 2013. “*Geografi Regional Indonesia*”. *Buku Ajar Pendidikan Geografi. FKIP Universitas Lampung*. Bandar Lampung.
- Sudarmi. 2005. “*Geologi Dasar*”. *Buku Ajar Pendidikan Geografi. FKIP Universitas Lampung*. Bandar Lampung.
- Sumadi Suryabrata. 2000. *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- . 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktisi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sri Moertiningsih Adioetomo. 2010. *Dasar-Dasar Demografi*. Selemba Baru. Jakarta..
- Tilar. H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Yoyon Bahtiar Irianto. 2011. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model*. Rajawali Pers. Jakarta.

Sumber Internet

www.bps.go.id.2014. *Badan Pusat Statistik: Dalam Angka*.

<http://www.tnp2k.go.id/id/program/program-membangun-keluarga-produktif/kartu-indonesia-pintar/> diakses pada tanggal 18 Desember 2016, pukul 08.50 WIB

<http://www.newsfarras.com/2016/02/Kartu-Indonesia-Pintar-Kartu-Indonesia-Sehat.html> diakses pada tanggal 18 Desember 2016, pukul 08.50 WIB

<http://ridwanalkhawarizmi96.blogspot.co.id/2014/11/efisiensi-dan-efektifitas-dana.html> diakses pada tanggal 20 Desember 2016, pukul 13.29 WIB